



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. R. A Kartini, Telepon (0914) 22060  
Fax. (0914) 22060 - Masohi 97511

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Nomor : 600/64/DPUPR/II/2024

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN TIDAK  
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanana tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan pemberian Kompensasi bagi penerima Layanan yang menerima Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah;
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan, jika dalam pemberian Layanan kepada penerima Layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah Tidak Sesuai dengan Standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat berupa :
- a. memberikan Layanan Prioritas pada proses berikutnya, dan
  - b. menyampaikan Permintaan Maaf atas Pelayanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Februari 2024.

Ditetapkan : Masohi

Pada Tanggal: 07 Februari 2024



HASAN FIRDAUSI, ST.,M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19740703 200312 1 007